

Kebijakan Ekonomi Politik Indonesia dan Tanggapan Masyarakat di Desa Panti Sumatera Barat

Fifi Febriandiel^{1*}, Yulhendri², Lince Magriasti³

^{1,2,3} Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kota Padang, Sumatera Barat

Diterima: 30-03-2023	Direvisi: 20-04-2023	Disetujui: 25-04-2023	Dipublikasi: 30-04-2023
----------------------	----------------------	-----------------------	-------------------------

Abstract

The purpose of the study topic called political economy is to look at political and economic forces interacting in a society. Political economists see the relationship between politics and the economy as an interconnected system in which economic structure can influence political policy and vice versa. The growth and history of political economy began in the 18th century with the introduction of economic theories by philosophers and economists such as Adam Smith and David Ricardo. They developed economic ideas, which are considered the cornerstones of contemporary economic growth. Incorporating aspects of socialism, nationalism and monotheism, the Indonesian Pancasila serves as a unifier for all existing ideas in Indonesian society. The study of political economy combines two different fields of study, politics and economics. Both must, coordinate human activities, handle conflicts, distribute costs and rewards, and satisfy human needs and wants. They must also show the same concern for organizational difficulties. In addition, handling the pandemic from an economic and political perspective is a challenge for the government and is a crucial issue. The implementation of these policies has its own difficulties because careful consideration must be given so that they can be carried out properly and efficiently. Qualitative research and descriptive techniques were used in this study. The findings of this study indicate that political economy policies in Indonesia have succeeded in gaining support from residents of Panti Village, Panti District, and Pasaman District. Indeed, there are still certain challenges, but the parties participating in this assistance program can overcome them.

Keywords: Policies, Political Economy, Responses of the Panti Village Community

Abstrak

Tujuan dari topik kajian yang disebut ekonomi politik adalah melihat interaksi kekuatan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Ekonom politik melihat hubungan antara politik dan ekonomi sebagai sistem yang saling berhubungan, di mana struktur ekonomi dapat mempengaruhi kebijakan politik dan sebaliknya. Pertumbuhan dan sejarah ekonomi politik dimulai pada abad ke-18 dengan diperkenalkannya teori-teori ekonomi oleh para filsuf dan ekonom seperti Adam Smith dan David Ricardo. Mereka mengembangkan gagasan ekonomi, yang dianggap sebagai landasan pertumbuhan ekonomi kontemporer. Memasukkan aspek sosialisme, nasionalisme, dan tauhid, Pancasila Indonesia berperan sebagai pemersatu seluruh gagasan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Studi ekonomi politik menggabungkan dua bidang studi yang berbeda, politik dan ekonomi. Keduanya harus, mengkoordinasikan aktivitas manusia, menangani konflik, mendistribusikan biaya dan penghargaan, dan memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Mereka juga harus menunjukkan kepedulian yang sama terhadap kesulitan organisasi. Selain itu, penanganan pandemi dari sudut pandang ekonomi dan politik menjadi tantangan bagi pemerintah dan menjadi isu krusial. Implementasi dari kebijakan-kebijakan tersebut memiliki kesulitan tersendiri karena pertimbangan yang matang harus diberikan agar dapat dilakukan dengan baik dan efisien. Penelitian kualitatif dan teknik deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi politik di Indonesia berhasil

* Penulis korespondensi
Email: fififebriandiel1702@gmail.com

mendapat dukungan dari warga Desa Panti, Kecamatan Panti, dan Kabupaten Pasaman. Memang masih ada tantangan tertentu, namun pihak-pihak yang berpartisipasi dalam program bantuan ini dapat mengatasinya.

Kata kunci: Kebijakan, Ekonomi Politik, Tanggapan Masyarakat Desa Panti

Pendahuluan

Suatu kebijakan publik melibatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan masyarakat yang berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Menurut M. Irfan Islamy, dalam pengertian demokrasi kontemporer, kompetensi negara meliputi pandangan publik serta pemikiran dan pendapat para pejabat terpilih yang bertugas sebagai wakil rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa agar suatu kebijakan dapat diterima dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan, otoritas publik yang menulis dan mengembangkan poin-poin yang menjadi perhatian publik harus mendengarkan pendapat dan rekomendasi dari masyarakat. Mereka juga harus mendasarkan keputusan mereka pada kepentingan publik.

Ekonomi politik (*political economy*) merupakan landasan ilmu ekonomi sebelum berkembang menjadi seperti sekarang ini. Ekonomi politik adalah cabang filsafat yang melibatkan pengkajian aspek ekonomi secara keseluruhan. Tentu saja, buku John Stuart Mill yang berpengaruh, *Principles of Political Economy*, yang memuat pandangannya, berdampak pada perkembangan ekonomi politik. Buku ini membahas beberapa topik, termasuk teori nilai dan distribusi, produksi, tenaga kerja, peran negara, perpajakan, utang negara, dan sosialisme, yang memberikan landasan penting bagi perkembangan ekonomi. Pendekatan ekonomi politik dan ekonomi murni sangat bervariasi dalam cara mereka memandang struktur kekuasaan sosial. Ekonom politik berpendapat bahwa pembentukan kekuasaan akan berdampak pada daya tarik ekonomi.

Ekonom politik dan pakar politik sama-sama mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang masalah ekonomi politik, yang merupakan cabang ilmu politik. Ekonomi politik, sebagaimana didefinisikan oleh Marx dan diuraikan dalam buku *The Oxford Handbook of Political Economics* oleh Barry dan Donald Wittman, berkaitan dengan kepemilikan alat produksi yang didasarkan pada proses sejarah. Mochtar Mas'oed mengklaim bahwa sementara itu, ekonomi politik adalah studi yang melihat hubungan antara peristiwa politik dan ekonomi, pemerintah dan masyarakat, pasar dan negara, serta lingkungan domestik dan global.

Ada perbedaan antara ekonomi dan ilmu politik di mana setiap disiplin ilmu memiliki metode analitisnya sendiri, beberapa di antaranya bahkan mengandalkan premis-premis yang bersaing. Karena mereka mungkin sangat tidak jelas dan membingungkan, teknik analisis ekonomi dan politik tidak dapat digabungkan. Namun, mengingat keduanya memiliki proses yang sama, ekonomi dan politik dapat dibandingkan. Seseorang dapat mengenali sifat yang berbeda dari kedua disiplin ilmu untuk memahami kesulitan menggabungkan penelitian ekonomi dan politik secara lebih mendalam. Kalkulasi, ketersediaan material, dan swa-regulasi adalah tiga prinsip yang selalu berhubungan dengan ekonomi.

Dalam konteks penelitian tentang hubungan antara ekonomi dan politik, ekonomi politik dapat dianggap sebagai teknik. Perilaku lembaga-lembaga politik yang berkolaborasi

untuk membuat kebijakan ekonomi dapat digunakan untuk mengamati hubungan ini. Selain itu, ekonomi politik adalah bidang ilmiah di mana ekonomi telah memainkan peran penting.

Untuk memahami bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan kapitalisme, sosialisme, komunisme, atau sistem lain berinteraksi, politik adalah bidang studi multidisiplin yang bergantung pada ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik (Heliany, 2021).

Berbagai sudut pandang dan konsep digunakan dalam studi ekonomi politik. Pemikiran liberal adalah cara pandang yang memiliki pengaruh cukup besar. Liberalisme adalah sudut pandang yang berpendapat bahwa agar orang berkembang sepenuhnya, kebebasan itu penting dan perlu. Sebagai orang yang mempopulerkan liberalisme, John Locke berpendapat bahwa filosofi politik utama haruslah kebebasan. John Locke mendefinisikan kebebasan sebagai tidak adanya campur tangan pihak luar dalam urusan sendiri (Aida, 2020). John Locke percaya bahwa manusia benar-benar memiliki tiga hak dasar (absolut) yang tidak dapat dipertanyakan: hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas properti. Dua ide dari sudut pandang liberal dapat digunakan untuk membingkai analisis kejadian ekonomi politik. kedua gagasan itu sangat logis dengan studi tentang bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik bergabung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dikenal sebagai ekonomi politik internasional (IPE) (Damayanti, 2019).

Kepentingan publik, negara, dan posisi sosial yang beragam menjadi fokus kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dikembangkan dan dilaksanakan tergantung pada kebutuhan periode, di mana permintaan akan barang-barang hukum semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu seiring dengan perkembangan zaman. Saat ini, penyebaran virus Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) telah menjadi viral. Hal ini berdampak besar pada tugas sehari-hari yang dilakukan serta mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kebijakan pemerintah ditetapkan oleh negara untuk melindungi masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai topik, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Kebijakan pemerintah yang peduli terhadap perekonomian merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah yang menarik perhatian masyarakat. Tentu saja, ekonomi dan politik masih berperan dalam bagaimana langkah-langkah ini digunakan dan diciptakan. dimana program tersebut dirilis di tengah pandemi dan masa pemulihan ekonomi dan politik. Berdasarkan kebijakan tersebut, penulis ingin mengkaji kebijakan ekonomi politik di Indonesia, baik dari segi regulasi maupun penerapannya pada masyarakat, khususnya yang ada di Desa Panti Sumatera Barat.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain (Creswell, 2007). Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berupaya menggambarkan fenomena/kejadian dengan apa adanya. Dalam penelitian deskriptif

data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian deskriptif ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut dan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi beserta catatan dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2005).

Menurut Sugiono (2017), metode penelitian adalah teknik ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk tujuan dan aplikasi tertentu. Penulis menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini. Sedangkan penulis lebih suka mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata daripada angka, penulis juga melakukan wawancara dengan anggota masyarakat setempat tentang masalah yang diteliti. Selain itu, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan, yang memerlukan pengumpulan informasi dan data secara menyeluruh dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, majalah, catatan, dan referensi lain yang relevan, untuk mendapatkan solusi dan landasan teori. untuk masalah yang sedang diselidiki.

Hasil dan Pembahasan

Setiap negara dan negara bagian memiliki cara hidup tertentu yang diatur oleh kebijakan publik. Meskipun semua bangsa mengalami persoalan yang sebagian besar sama, cara setiap negara menangani masalah ini berbeda-beda. Kebijakan publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi ini. Kebijakan publik merupakan ekspresi konkrit dari setiap upaya pemerintah untuk menguasai masyarakat secara keseluruhan, yang dikenal dengan negara dan negara, karena merupakan ruang lingkup negara atau pemerintah, atau kewenangan pemegang negara. Kapasitas setiap negara untuk membuat kebijakan publik yang luar biasa menjadi indikator yang lebih penting dari supremasi negara tersebut. Pemerintah merumuskan kebijakan publik dalam bentuk inisiatif legislatif. Kebijakan publik memiliki tujuan yang jelas apakah ia melakukan sesuatu atau tidak. Pejabat publik dipilih untuk membuat kebijakan demi kebaikan masyarakat.

Setiap kehidupan bangsa dan negara diatur oleh kebijakan publik. Masalahnya sama di semua negara, tetapi cara mereka mendekatinya berbeda-beda. Kebijakan publik adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan reaksi ini. Kebijakan publik merupakan representasi sejati dari setiap usaha pemerintah untuk mengatur kehidupan secara kolektif, yang dikenal dengan negara dan negara, karena merupakan ruang lingkup negara atau pemerintah, atau pemegang kekuasaan negara. Kemampuan setiap bangsa untuk membuat kebijakan publik yang luar biasa menjadi indikator yang lebih penting dari keunggulan bangsa tersebut serta mengkaitkan dengan bidang ilmu ekonomi politik.

Ekonom politik merumuskan teori tentang perlunya mempromosikan aktivitas ekonomi (komersial). Pada saat itu, pasar dianggap belum berkembang, sehingga terserah kepada pemerintah untuk memperluas peluang perdagangan, menawarkan perlindungan terhadap persaingan, dan mengawasi produksi barang-barang berkualitas tinggi. Pemerintah tidak lagi dipandang sebagai instrumen yang berguna untuk mengendalikan aktivitas ekonomi, melainkan sebagai badan yang menghambat upaya untuk mencapai kekayaan, yang pada akhir abad ke-18 bertentangan dengan perspektif ini. Dalam tradisi ekonomi politik, banyak aliran

pemikiran yang pada akhirnya berkembang sebagai akibat ketidaksepakatan di antara para ekonom politik.

Sekolah secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) sekolah ekonomi politik klasik yang didirikan oleh Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, Nassau Senior, dan Jean Baptiste; (2) aliran analisis ekonomi politik yang dipimpin oleh Edmund Burke; (3) aliran ekonomi politik radikal yang dipromosikan oleh William Godwin, Thomas Paine, Marquis de Condorcet, dan tentu saja, Karl Marx.

Dalam konteks mengkaji keterkaitan teori ekonomi politik dengan institusi ekonomi, terdapat dua perspektif penting. Pertama, diakui bahwa tidak semua mekanisme pasar dapat mengendalikan secara efisien aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan alat-alat ekonomi tambahan untuk mengatasi kekurangan proses pasar. Penyusunan undang-undang dan kelembagaan menjadi langkah yang penting, yang dalam banyak kasus melibatkan peran pemerintah. Kedua, diperhatikan bahwa tidak boleh semata-mata menggunakan efisiensi ekonomi sebagai model bisnis. Dalam konteks ini, ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan melihat efisiensi ekonomi melalui lensa biaya transaksi, namun juga mengakui bahwa evaluasi ekonomi tradisional berdasarkan biaya produksi juga penting.

Selain itu, ekonomi politik juga berkembang menjadi disiplin yang melibatkan bidang-bidang ilmu sosial yang lebih luas, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik, pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Disiplin ini juga memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan ekonomi nasional dan internasional ketika negara-negara industri seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman mulai muncul. Ekonomi politik kiri dan kanan muncul sebagai dua sekolah dasar ekonomi politik pada abad ke-20. Mazhab ekonomi politik sosialis, yang dipengaruhi oleh ide-ide Karl Marx, sangat menekankan kontrol masyarakat atas sumber daya ekonomi dan distribusi kekayaan sebagai cara meredakan keresahan sosial. Ekonomi politik sayap kanan, di sisi lain, yang dipengaruhi oleh analisis dan pemikiran liberal, menekankan nilai kemandirian pasar, kebebasan pengambilan keputusan ekonomi individu, dan sedikit campur tangan pemerintah dalam ekonomi.

Ekonomi politik adalah cabang dari ilmu sosial yang dibangun di atas dasar ekonomi dan politik. Ekonomi politik adalah kombinasi dari ilmu politik dan ekonomi dengan penekanan yang berbeda pada masing-masing. Paling tidak, keduanya memberikan perhatian yang sama pada isu-isu berikut: merencanakan dan mengarahkan aktivitas manusia, menangani konflik, mendistribusikan biaya dan imbalan, serta memenuhi persyaratan dan memenuhi aspirasi manusia atau masyarakat yang ada di Indonesia. (Lies Afronyati, 2019). Ekonomi politik menjadi semakin penting dalam periode globalisasi untuk mengendalikan kebijakan perdagangan dan investasi internasional serta memajukan manusia dan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi politik menjadi lebih penting dalam mengatasi masalah global termasuk kemiskinan, ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi.

Sebenarnya, ada dua perspektif untuk mengkaji seberapa erat kaitan teori ekonomi politik dengan institusi ekonomi. Mari kita mulai dengan pernyataan bahwa tidak semua mekanisme pasar dapat digunakan untuk mengendalikan aktivitas ekonomi. Dalam hal ini, alat ekonomi tambahan diperlukan untuk mengkompensasi kekurangan proses pasar. Merumuskan undang-undang dasar adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari gagasan mekanisme

ekonomi dan desain kelembagaan, yang dalam banyak hal memerlukan keterlibatan pemerintah. Kedua, dilarang menggunakan efisiensi ekonomi sebagai model berbisnis. Ekonomi politik dan ekonomi kelembagaan melihat efisiensi ekonomi dari biaya transaksi, tetapi hanya jika ekonomi mengevaluasinya secara tradisional hanya dari biaya produksi.

Ketika ada monopoli, inefisiensi disebabkan oleh struktur pasar saat ini dan kesulitan yang dimiliki perusahaan monopoli dalam memperkirakan jumlah pelanggan dan bernegosiasi dengan mereka. Korporasi tidak mengkompensasi pengeluaran tambahan ini dalam keadaan eksternal ketika biaya produksi sosial lebih besar daripada biaya produksi pribadi. Di negara-negara berkembang, di mana institusi pasar relatif rapuh, baik teori ekonomi politik maupun ekonomi institusional memiliki banyak penerapan. Pada dasarnya ada dua bentuk pendekatan analitis dalam bisnis pertanian. Modelnya adalah analisis teknis-ekonomi terlebih dahulu. Komponen keuangan operasi investasi harus mempertimbangkan keuntungan masyarakat. petani kecil termasuk yang paling diuntungkan dari investasi karena mereka sangat membutuhkannya. Akibatnya, rencana pembangunan pertanian pemerintah selalu diarahkan pada kebutuhan masyarakat petani secara keseluruhan.

Kebijakan Ekonomi Politik di Indonesia masa Pandemi

Kebijakan publik adalah otoritas pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam mengelola kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Definisi kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk pengambilan keputusan secara langsung. di setiap Pelaksanaan kebijakan publik didahului dengan perumusan masalah yang teridentifikasi kemudian implementasi kebijakan yang dituju memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.

Pada kenyataannya, frasa "kebijakan publik" sering digunakan baik dalam pidato biasa maupun dalam konteks akademik seperti ilmu sosial-politik, ekonomi, dan kelas hukum. Namun, frasa ini bisa juga berlaku untuk sesuatu yang lebih khusus, seperti inisiatif deregulasi dan birokratisasi pemerintah. Charles O. Jones (1984) mengklaim bahwa meskipun istilah "kebijakan" digunakan dalam pembicaraan biasa, sebenarnya mengacu pada tindakan atau pilihan yang benar-benar berbeda. Istilah "tujuan", "program", "keputusan", "standar", "proposal", dan "rancangan besar" sering digunakan secara bergantian. Terlepas dari kenyataan bahwa beberapa orang mungkin melihat kebijakan publik sebagai sesuatu yang abstrak atau sebagai sesuatu yang terjadi pada orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas, kami sangat dipengaruhi oleh banyak kebijakan publik setiap hari dan berkaitan dengan salah satu ilmu ekonomi dan politik.

Dapat disimpulkan bahwa ada empat pengertian atau definisi yang telah disebutkan. Pada komponen utama kebijakan publik adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik meliputi orang (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi, dan norma masyarakat.
2. Tujuan suatu kebijakan adalah arah yang ingin diambil pembuatnya.
3. Instrumen, perlengkapan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kebijakan.

4. Dampak, hasil dari suatu kebijakan, diinginkan atau tidak diinginkan.

Landasan untuk menentukan jenis kebijakan publik yang digunakan adalah empat komponen utama tersebut.

Mengingat banyak elemen ekonomi dan banyak peserta dalam pemerintahan, kebijakan adalah sesuatu yang mutlak penting. Kebijakan adalah sesuatu yang mengatur segala sesuatu. Karena kebijakan ekonomi adalah yang mengendalikan kegiatan skala kecil dan besar yang terkait dengan ekonomi. Kebijakan ekonomi politik juga berlaku untuk masalah ini. Ini mencakup strategi politik dan ekonomi yang digunakan selama pandemi.

Setidaknya ada lima aspek dari strategi ekonomi politik ini yang menjadikannya lebih efektif bila digunakan. Menggunakan kerangka ekonomi politik bertujuan untuk mengakui legitimasi dan adanya variasi dalam budaya politik, baik formal maupun informal. Kegunaan proposal di bidang pencegahan pemikiran deterministik juga akan diperkuat dengan analisis kebijakan. Ketiga, analisis kebijakan melarang membuat penilaian tentang berbagai tindakan berdasarkan kerangka waktu yang terbatas. Keempat, statis teoretis yang sepenuhnya berorientasi tidak dapat digunakan dalam analisis kebijakan yang berkonsentrasi pada negara-negara berkembang. Kelima, analisis kebijakan dapat lebih memahami bagaimana orang berinteraksi satu sama lain.

Adapun fundamental ekonomi politik meliputi:

1. Kekuasaan: Ekonomi politik memeriksa siapa yang memiliki kendali atas sumber daya ekonomi dan bagaimana otoritas itu dijalankan.
2. Sistem ekonomi: Ekonomi politik mengkaji bagaimana berbagai struktur ekonomi, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran, berdampak pada bagaimana sumber daya didistribusikan dalam perekonomian.
3. Kebijakan Publik: Ekonomi politik mengkaji bagaimana hukum, peraturan, dan kebijakan moneter mempengaruhi ekonomi dan masyarakat. Contoh kebijakan tersebut adalah pajak, subsidi, dan pembatasan.
4. Pasar: Ekonomi politik mengkaji bagaimana pasar berfungsi, termasuk persaingan, penetapan harga, penawaran, dan permintaan, serta bagaimana pasar memengaruhi kebijakan ekonomi dan alokasi sumber daya.
5. Kelas sosial: Ekonomi politik memperhitungkan bagaimana kelas sosial memengaruhi ekonomi dan bagaimana ketidaksetaraan dalam alokasi sumber daya berkontribusi pada keresahan sosial.
6. Ekonom politik mempelajari variabel yang menentukan pertumbuhan ekonomi, termasuk investasi, teknologi, dan pembangunan manusia, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan publik dan bagaimana sumber daya dialokasikan.
7. Lingkungan: Ekonomi politik mempertimbangkan lingkungan saat menentukan bagaimana kebijakan dapat mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ide dasar ekonomi politik membantu dalam memahami operasi sistem ekonomi dan dampak potensial dari kebijakan publik pada keduanya.

Seperti yang mungkin kita ketahui, wabah COVID-19 menghancurkan operasi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak pandemi ini terhadap perekonomian adalah COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Untuk mencegah stabilitas keuangan negara, diperlukan langkah-langkah yang dapat mengendalikan pembangunan ekonomi. Sementara itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Untuk menurunkan laju adrenalin ekonomi, pemerintah telah memberlakukan program-program yang mendorong investasi.

Pemerintah telah merilis sejumlah langkah politik selama epidemi ini selain langkah ekonomi. Kebijakan pemerintah adalah penerbitan rancangan dan ketentuan undang-undang hak cipta karya (UU omnibus law). Sayangnya, meski pemerintah sudah berupaya maksimal untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, strategi ini ditentang sejumlah kalangan. Tidak hanya kebijakan tersebut, ada juga beberapa kebijakan lain yang diumumkan pemerintah Indonesia saat menghadapi pandemi dan fokus pada ekonomi dan politik, salah satunya adalah keputusan untuk tetap menyelenggarakan pemilihan umum pada tahun 2020 (Damayanthi, 2019).

Banyaknya langkah-langkah ini menimbulkan pertanyaan: Apakah kebijakan ini cocok untuk ekonomi politik di tengah pandemi saat ini? Apa replikasi kebijakan yang terealisasi dengan baik? Apakah dengan adanya kebijakan tersebut membantu menjamin perekonomian, baik perekonomian negara maupun masyarakat?

Penulis melakukan wawancara dengan beberapa orang yang ada di Desa Panti dan berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas. Berikut adalah temuan dari wawancara penulis, Narasumber oleh Bapak Hifni Zen yang mana penjelasannya bahwa beliau setuju dengan kebijakan yang dikauinya bahwa sedikit kecewa. Ia mengatakan, “Namun sayangnya, dalam pelaksanaan beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terdapat kekurangan yaitu masyarakat tidak leluasa bergerak melakukan pekerjaan seperti semula, yang juga membuat masyarakat berjuang untuk memenuhi kebutuhannya. Sebut saja Kebijakan Kartu Prakerja yang juga dikeluarkan di masa pandemi ini. Orang-orang yang pada hakekatnya memiliki pekerjaan/sumber penghasilan tetapi tetap mendaftarkan diri sebagai peserta kartu prakerja adalah target yang sebenarnya dalam situasi ini, sehingga penerbit kebijakan ini harus lebih berhati-hati ketika menerima peserta kartu prakerja. Selain itu, ada kebijakan seperti PSBB. Sambil melanjutkan beberapa rekomendasi. Yang diharapkan kebijakan pemerintah ke depan lebih dipersiapkan dengan baik sehingga dapat diterapkan di masyarakat sehingga tercapai baik tujuan kebijakan maupun tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan yang telah ditetapkan merupakan kebijakan yang baik, namun masih terdapat kekurangan dalam cara pelaksanaannya yaitu pembuatan kebijakan tersebut dianggap tidak tepat untuk menggunakan target ini.

Adapun narasumber yang peneliti temui dan wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Ibu Rumah Tangga dari Desa Panti dan salah satu anggota Kartu Prakerja, mengungkapkan bahwa: “Kalau partai demokrasi menang pemilu, boleh saja, tapi saya menyayangkan kebijakan dan cara pelaksanaannya. Kenapa kita tidak boleh menjalankan ibadah di tempat ibadah pada hari-hari besar padahal kita berniat melakukannya di tempat kita masing-masing?

rumah atau online?" Tapi mengapa kampanye masih kuat selama periode pemilu? Ya, meski sudah ada aturan untuk tidak berkumpul di satu tempat, ini menjelaskan mengapa calon wakil rakyat yang nantinya akan membentuk pemerintahan tetap melakukan kegiatan yang menarik banyak orang meski ada aturan tersebut. Apa pun yang salah, materi pun begitu mahal. Anda mungkin terlibat dalam politik, tetapi ada pandemi yang terjadi saat ini. Terkait pandangan Ibu Rahmawati terhadap kebijakan pemerintah, beliau menyatakan bahwa "kalau untuk kebijakan yang dikeluarkan ada pemerintah yang bagus tapi ada juga yang masih kurang tepat dikeluarkan di masa pandemi seperti ini, salah satunya adalah kebijakan untuk menjaga membuka tempat wisata juga sama apa gunanya komunitas stay home, anak sekolah stay home dan belajar online, kalau tempat wisata masih buka ya kan juga bikin ramai.

Ibu Rahmawati berpendapat tentang kebijakan pemerintah lainnya, seperti membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian penduduk. Untuk kebijakan bantuan, ini sangat senang pemerintah mengeluarkannya. Namun sangat disayangkan dalam pendistribusian bantuan ini masih ada yang tidak menerima, dan yang sangat disayangkan adalah orang yang tidak menerimanya adalah masyarakat yang ekonominya lemah, yang seharusnya bahkan tidak bisa mendapatkan bantuan. Ini tidak yakin apakah itu kurangnya pengetahuan atau hanya karena saya tertarik juga. Tapi saya juga berharap ke depan, pemerintah lebih banyak memberikan informasi tentang data warganya, termasuk siapa yang harus menerima bantuan dan siapa yang tidak.

Penulis mewawancarai beberapa komunitas lain dan hasil jawabannya tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan kedua orang tersebut. Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan dari hasil wawancara sebagai berikut: (1) Kebijakan pemerintah yang mendorong pelayanan masyarakat lebih banyak terdengar saat ini; (2) Sangat penting untuk memiliki kebijakan yang mencegah terjadinya kerumunan. Sayangnya, kebijakan tersebut setara dengan menjalankan kampanye selama pemilihan umum dengan tetap membuka tempat wisata. Namun, kedua belah pihak mengkhawatirkan politik dan ekonomi negara, dan sayangnya bertepatan dengan wabah penyakit yang sedang di alami di Negara Indonesia ini.

Kesimpulan

Penetapan kebijakan yang sehat terkait ekonomi dan politik di masa pandemi merupakan salah satu hal yang perlu dan harus dilakukan. Ekonomi politik merupakan salah satu bagian yang melekat dalam keberadaan negara dan masyarakat. Karena mempertahankan pembangunan ekonomi di suatu negara adalah masalah tersendiri. Di tengah pandemi seperti yang kita alami saat ini, sejumlah kebijakan telah diterbitkan dan diantisipasi mampu menyelesaikan persoalan politik dan ekonomi. Menurut kajian penulis, menerapkan kebijakan ekonomi politik di masa pandemi seperti ini merupakan tindakan terbaik karena akan membantu mengatasi persoalan ekonomi yang sedang merosot saat ini. Namun implementasi kebijakan lainnya dianggap masih melenceng, sehingga masih perlu dikaji ulang terkait kebijakan tersebut.

Distribusi sumber daya yang dikembangkan dan arah kegiatan pembangunan atau investasi dipengaruhi oleh unsur kelembagaan yang ada di masyarakat. Pengembalian keputusan kurang baik yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang paling

membutuhkannya, terutama komunitas pertanian kecil, dibandingkan kelompok orang lain, sehingga pengelolaan kebijakan pembangunan dalam ekonomi dan politik oleh pemerintah senantiasa difokuskan pada masyarakat yang menurut temuan kelas menengah ke atas

Daftar Pustaka

- Damayanthi, V. R. (2019). Proses Industrialisasi di Indonesia dalam Prespektif Ekonomi Politik. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 2(1).
- Ekon.go.id. (2020). Indonesia Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan Korsel dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Retrieved from Ekon.go.id website: https://www.ekon.go.id/unduh/info_sektoral/33/berita-indonesia-perkuat-kerja-sama-bilateral-dengan-korsel-dalam-penanganan-pandemi-covid-19
- Emzir, E. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data. Rajawali Pers.
- Heliany, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. Prosiding Seminar Stiami.
- Infeksiemerging.kemkes.go.id. (2021). Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 8 Juli 2021. Retrieved July 23, 2021, from infeksiemerging.kemkes.go.id.
- Irawan, J. (2020). Fenomena Covid-19: Dampak Globalisasi Dan Revitalisasi Utilateralisme. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*. <https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3877.47-52>
- Jose, H. S., & Indah Pratiwi Eri Putri. (2021). Tatanan Global Pada Pembangunan Dan Ekonomi Politik Internasional Selama Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 5.
- Junaedi, D., & Salistia, F. (2020). Dampak Kawasan dan Status Negara Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara Terdampak Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.187>.
- Kurniawan, M. B. (2021). Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi atas Kesehatan. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.37-56>
- Kusno, F. (2020). Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19. *Anterior Jurnal*. <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>
- Lies Afroniyati. (2020). Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal oleh Majelis Ulama Indonesia. *Kebijakan Dan Administrasi Public*.
- Morrison. (2019). Riset Kualitatif Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Riant, N. (2009). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan)*. PT. Elex Media Komputindo
- Sugiono, S. (2017). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.



© 2023 oleh penulis. Pemegang Lisensi JEA, Indonesia. Artikel ini merupakan artikel akses terbuka yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Lisensi Atribusi Creative Commons (CC BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)